

**PELAKSANAAN COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MENGURANGI
PRAKTIK RENTENIR “BANK EMOK”
Di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar**

Ririn Yulianti

Program Studi Ilmu Pemerintahan
STISIP Bina Putera Banjar
E-mail: ririnyulianti1990@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan collaborative governance dalam memecahkan masalah praktik rentenir ‘bank emok’ sebagai Upaya penurunan angka kemiskinan di desa Balokang Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai pelaksanaan collaborative governance dalam mengurangi praktik rentenir “Bank emok” di Desa Balokang. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun dalam Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Collaborative Governance dalam mengurangi praktik rentenir “bank emok di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar dapat dikatakan belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari beberapa proses collaborative governance menurut Ansell dan Gash yang tidak tercapai seperti (1) Belum dilakukannya kerjasama dengan pihak swasta; (2) Proses pelaksanaan kerjasama yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan (3) timbulnya kesalah pahaman antar pihak/ stakeholder dalam hal menentukan sistem kebijakan yang akan diterapkan.

Kata Kunci: (*collaborative governance, rentenir, desa*)

ABSTRACT

This study discusses the implementation of collaborative governance in solving the problem of "bank emok" moneylender practices as an effort to reduce poverty in Balokang Village. This study use a qualitative descriptive method. Data collection is carried out by interview, observation, and documentation techniques. The informants in this study used purposive sampling. The results of the study show that the implementation of Collaborative Governance in reducing the practice of loan sharks "bank emok in Balokang Village, Banjar District, Banjar City can be said to have not run optimally, this can be seen from several processes of collaborative governance according to Ansell and Gash which have not been achieved, such as (1) Collaboration has not been carried out with private parties; (2) The process of implementing the cooperation has not run as it should, and (3) the emergence of misunderstandings between parties/stakeholders in terms of determining the policy system to be implemented

Keywords: (*min. 3 words, max. 6 words and more specific, for example do not use abbreviated phrases*)

PENDAHULUAN

Setiap manusia memiliki kebutuhan dan keinginan masing-masing untuk bertahan hidup, beragam cara dilakukan demi pemenuhan kebutuhannya, itu sebabnya setiap orang membutuhkan uang. Uang dapat diperoleh dari bekerja, memiliki usaha atau berjualan, apabila memiliki uang terbatas masyarakat harus mencari cara untuk pemenuhan tersebut. Saat ini bermunculan lembaga keuangan formal dan informal seperti rentenir yang menawarkan pinjaman uang dan solusi lain masalah keuangan.

Praktik rentenir ini dalam menjalankan usahanya dikenal dengan istilah Bank emok, dimana istilah Bank Emok ini adalah sebuah lembaga keuangan mikro Bank rakyat pedesaan yang berasal dari Bangladesh yang dipelopori oleh Profesor ekonomi Mohammad Yunus, dengan konsep penagihannya bukan secara perorangan melainkan secara berkelompok (*group lender*) (Meta Maftuhah, 2017). Model Bank Emok dalam praktiknya pencairan pinjamannya mudah, namun pengembaliannya lebih tinggi, (Sri Mulyani dalam Giri Hartomo, 2017).

Keberadaan rentenir atau sebutan lain bank emok/ bank keliling yang saat ini masih meresahkan masyarakat di seluruh daerah. Awalnya bank emok ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan keuangan masyarakat, karenanya banyak orang yang berminat daftar menjadi anggota terutama para ibu rumah tangga, namun saat membayar cicilan, munculah permasalahan lain yang semakin membuat mereka resah. Disebut meresahkan karena dalam setiap pertemuan yang sudah ditentukan waktunya, nasabah yang mengajukan pinjaman uang wajib membayar dan tidak diperkenankan mengatakan alasan apapun untuk tidak membayar angsurannya, selain itu sistem angsurannya menggunakan sistem tanggung renteng, sehingga banyak masyarakat yang kesulitan membayar.

Adapun beberapa kasus yang terjadi di beberapa daerah. Berikut di bawah ini

beberapa dampak masyarakat dari peminjaman terhadap rentenir diantaranya:

1. Masyarakat rela mengungsi ke gubuk tepi bukit akibat tidak ingin di tagih rentenir seperti di sukabumi pada tahun 2019,
2. Masyarakat hampir mengakhiri nyawanya karena tidak mampu membayar pinjaman uang tersebut, seperti kejadian di Pandeglang tahun 2022 ibu rumah tangga yang nekat bunuh diri gara-gara terlilit hutang ke bank emok,
3. Dua warga di ciamis nyaris adu jotos gara-gara di tagih oleh bank emok,
4. Warga di kota banjar yang resah sampai menjual rumahnya.

Berdasarkan fenomena diatas hal tersebut tidak menyurutkan keinginan masyarakat yang ada di Desa Balokang Kecamatan Banjar untuk tetap meminjam ke rentenir, masyarakat rela berhutang kepada rentenir untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keinginannya, berdasarkan data diperoleh bahwa jumlah penduduk yang cukup banyak sebanyak 11.252 orang, dan terdiri dari 4 dusun, selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat di desa balokang terkait masyarakat yang pinjam ke rentenir bahwa ibu tersebut rela meninggalkan suami dan anaknya akibat dari terlalu banyak piutang ke rentenir, selain itu ada pula yang sampai menjual rumahnya karena terlalu banyak pinjaman.

Dalam upaya mengurangi praktik rentenir perlu campur tangan desa, swasta dan masyarakat sebagai wadah dari pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun realita di lapangan Desa Balokang belum bisa menggandeng instansi lain untuk membantu mengurangi rentenir.

Maka dengan fenomena di atas, bahwa salah satu landasan pokok untuk mengurangi rentenir di desa Balokang adalah adanya pembagian tugas dan peran seluruh pihak dalam mengurangi rentenir, dimana pihak-pihak yang terlibat supaya dapat berjalan dengan baik adalah:

1. Pemerintah
2. Pihak non pemerintah (Dunia usaha/lembaga privat, pengelola
3. Masyarakat

Berdasarkan atas beberapa kondisi tersebut maka dipandang perlu melihat kolaborasi para stakeholder dalam penanganan praktik rentenir di desa balokang.

LANDASAN TEORI

1. Colaborative Governance

Salah satu bentuk konsep penyelenggaraan pemerintahan atau *governance* yang akhir-akhir ini menjadi kajian penting dan menarik dalam konteks studi ilmu pemerintahan adalah konsep *collaborative governance* atau penyelenggaraan pemerintahan yang kolaboratif.

Collaborative Governance merupakan langkah tatanan pemerintahan yang didalamnya terdapat keterlibatan semua pihak antara *government*, *civil society*, dan *private sector* dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kerangka egalitarianisme dan demokrasi yang telah mengedepankan tata pemerintahan demi kepentingan masyarakat. Keterlibatan pihak swasta dan masyarakat dalam pembuatan maupun pelaksanaan kebijakan publik dibutuhkan untuk mewujudkan *good governance*.

Selanjutnya Ansell dan Gash (Syaeful Islamy 2018: 82) membuat model *Collaborative Governance* sebagai berikut:

- a. *Face to face dialogue* (Dialog Tatap Muka) Semua bentuk *collaborative governance* dibangun dari dialog tatap muka secara langsung dari setiap stakeholder yang terlibat. Sebagaimana *collaborative governance* yang berorientasikan proses, dialog secara langsung sangat penting dalam rangka mengidentifikasi peluang dan keuntungan bersama. Dialog secara tatap muka langsung bukanlah semata-mata merupakan negoisasi yang alakadarnya. Dialog secara

langsung ini dapat meminimalisir antagonisme dan disrespect dari antar stakeholder yang terlibat. Sehingga mereka dapat bekerjasama sesuai dengan tujuan dan kebermanfaatannya bersama.

- b. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan) Buruknya rasa percaya antar stakeholder memang merupakan hal yang lumrah di awal proses kolaborasi. Kolaborasi memang bukan semata tentang negoisasi antar stakeholder, namun lebih dari itu merupakan upaya untuk saling membangun kepercayaan satu dengan yang lainnya. Membangun kepercayaan perlu dilakukan sesegera mungkin ketika proses kolaborasi pertama dilakukan. Hal ini diupayakan agar para stakeholder tidak mengalami egosentrisme antar institusi. Oleh karenanya, dalam membangun kepercayaan ini, diperlukan pemimpin yang mampu menyadari akan pentingnya kolaborasi.
- c. *Commitment to the process* (Komitmen Terhadap Proses) Komitmen tentunya memiliki relasi yang kuat dalam proses kolaborasi. Komitmen merupakan motivasi untuk terlibat atau berpartisipasi dalam *collaborative governance*. Komitmen yang kuat dari setiap stakeholder diperlukan untuk mencegah resiko dari proses kolaborasi. Meskipun komitmen memang merupakan hal yang rumit dalam kolaborasi. Komitmen merupakan tanggung jawab dari stakeholder supaya memandang relasi yang dilakukan sebagai hal yang baru dan tanggungjawab tersebut perlu dikembangkan.
- d. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama) Pada poin yang sama dalam proses kolaborasi, stakeholder yang terlibat harus saling berbagi pemahaman mengenai apa yang dapat mereka

capai melalui kolaborasi yang dilakukan. Saling berbagai pemahaman ini dapat digambarkan sebagai misi bersama, tujuan bersama, objektivitas umum, visi bersama, ideologi yang sama, dan lain-lain. saling berbagi pemahaman dapat berimplikasi terhadap kesepakatan bersama untuk memaknai dan mengartikan suatu masalah.

- e. *Intermediate Outcomes* (Hasil Sementara) Hasil lanjutan dari proses kolaborasi terwujud dalam bentuk output atau keluaran yang nyata. Hal ini merupakan hasil proses yang kritis dan esensial dalam mengembangkan momentum yang dapat membimbing demi keberhasilan suatu kolaborasi. *Intermediate outcomes* ini muncul apabila tujuan yang mungkin dan memberikan keuntungan dari kolaborasi yang mana secara relative konkrit dan ketika “small wins” dari suatu kolaborasi dapat dimungkinkan terjadi. Kemandirian Desa

2. Rentenir atau bank emok

Rentenir merupakan seseorang yang bersedia memberikan pinjaman yang mudah, tanpa jaminan dengan suku bunga tinggi dalam jangka pendek dan selalu berusaha menjaga kredit dengan pelanggan

Praktek rentenir menjalankan usahanya disebut Emok Bank, istilah Emok berasal dari bahasa Sunda yang berarti emok duduk, dan debiturnya adalah seorang wanita yang duduk di tanah (emok).

Alasan masyarakat bergantung ke rentenir Bank Emok, (Ardhan Adhi Candra, 2016): Masyarakat masih banyak akses sulit untuk mengamankan keuangan. Proses dan persyaratan peminjaman mudah dan tidak membutuhkan banyak syarat, memberikan pinjaman tanpa jaminan dan menyediakan tepat pada waktunya.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung.

Informasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling

Jumlah informan dalam penelitian kualitatif tidak dapat ditentukan, sementara informan dalam penelitian ini yaitu orang - orang yang mengetahui secara pasti dan jelas mengenai Pelaksanaan *Collaborative Governance* Dalam Mengurangi Praktik Rentenir “Bank Emok” Di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar, adapun informan tersebut diantaranya:

1. Kepala desa Balokang
2. Pegawai desa
3. Anggota BPD
4. Bumdes
5. PNM Mekar
6. Masyarakat

Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari informan berupa informasi dan data hasil wawancara dengan pihak yang berkepentingan dari BPD, Kepala desa, pegawai desa, PMM Mekar, Bumdes, dan masyarakat.

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Proses dalam analisis data pada tahap pertama merupakan reduksi data, dimana data-data yang terkumpul melalui observasi, wawancara, hingga pada

dokumentasi-dokumentasi diseleksi dan dipilah sesuai dengan kebutuhan penulis dalam penelitian.

2. Model Data (Data Display)

Proses ini merupakan tahap kedua dalam analisis data, dimana data- data serta informasi yang diperoleh dan telah melewati tahap reduksi data ditampilkan atau disajikan dalam bentuk teks naratif, garfik atau bagan- bagan yang menunjukkan keberagaman data yang panjang dan rinci. Maksud dari display data ini pun dapat mempermudah pembaca menemukan data- data yang dibaca secara sistematis dan rinci.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam pengolahan data. Tahap ini dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Selain itu, melakukan teknis triangulasi yaitu melalui teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan collaborative governance merupakan pendekatan atau model yang mencoba menguraikan suatu kondisi permasalahan yang bisa diselesaikan dengan adanya upaya sinergi atau kerjasama antar pihak. Proses ini harus dilalui dalam upaya mencapai satu pemahaman yang menjadi orientasi nilai yang akan dicapai.

Pelaksana untuk mengatasi masalah rentenir di Desa Balokang terdiri dari BPD, Aparat Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Lembaga Kemasyarakatan meliputi Karang Taruna, PKK.

Adapun di bawah ini pelaksanaan kolaborasi di desa balokang dalam mengurangi praktik rentenir diantaranya:

a. *Face to face dialogue* (Dialog Tatap Muka)

Kolaborasi dalam mengurangi praktik rentenir dilakukan dengan *Face to*

Face Dialogue agar terjalin interaksi pada setiap musyawarah.

Proses kolaborasi *face to face dialogue* belum berjalan dengan sesuai, ditunjukkan dengan baru akan mengadakan pertemuan dengan para stakeholders guna mengurangi praktik rentenir di Desa Balokang.

Pertemuan hanya baru diskusi kecil dan pihak yang terlibat yaitu Pemerintah Desa (diwakili oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kasi Ekonomi Pembangunan), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Face to face dialogue sampai saat ini memang belum pernah melibatkan pihak swasta, karena pemerintah desa belum yakin jika harus memberantas rentenir di desa balokang, karena selama ini masyarakat belum ada pengaduan mengenai dampak adanya rentenir tersebut, namun rencana ke depan adalah akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengurangi praktik rentenir di kota Banjar, atau khususnya warga desa balokang yang anti riba.

b. *Trust Building* (Membangun Kepercayaan)

Membangun kepercayaan dalam menangani praktik rentenir memiliki arti bahwa semua pihak memang memiliki niat dan tekad yang sama yaitu untuk mengambil suatu kebijakan atau keputusan yang terbaik untuk kedepannya.

Dalam hal ini semua pihak memiliki niat untuk mengurangi praktik rentenir, babinmas, kepala desa, dan ormas supaya ikut langsung memberantas rentenir, namun pada pelaksanaannya belum adanya Tindakan tegas dari pemerintah desa untuk memberantas praktik rentenir, hal ini dikarenakan masyarakat tidak pernah mengeluhkan masalah rentenir kepada pemerintah desa.

c. *Commitment to Proses*

Faktor penting dalam kolaborasi adalah komitmen dari para stakeholder yang terlibat untuk mendukung

keberhasilan proses kolaborasi, walaupun dalam melaksanakan komitmen ini senantiasa diwarnai dengan konflik dan dilema. Stakeholder yang terlibat mesti mematuhi dan melaksanakan seluruh hasil musyawarah sebagai bentuk komitmen walaupun keputusan tersebut harus melibatkan stakeholder yang berbeda pemahaman dan pandangan

Mengurangi praktik rentenir di desa Balokang harus dibangun dengan melibatkan semua stakeholder terkait dalam setiap pengambilan keputusan dalam musyawarah. Komitmen yang dibangun adalah bagaimana mengurangi praktik rentenir dengan bertahap. Selain itu, program yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan semua orang.

Komitmen antara Pemerintah Desa dengan masyarakat dilihat pada hasil keputusan musyawarah, dimana pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan bersama. Masyarakat juga melakukan apa yang telah diputuskan. Banyaknya masyarakat yang ingin meminjam uang tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan atau untuk modal usaha namun pemerintah desa belum menghimbau masyarakat untuk tidak meminjam ke rentenir.

Komitmen dari mengurangi rentenir adalah akan menghasilkan masyarakat yang sejahtera dengan tidak terlilit hutang dimana mana. Inilah yang sebenarnya menjadi acuan dari Pemerintah Desa dalam mengurangi rentenir di Desa Balokang.

Selain itu komitmen lain bahwa pemerintah desa harus berani menindak tegas para rentenir yang berkeliaran di desa balokang, sehingga semua stakeholders harus terlibat untuk melaksanakan komitmen tersebut.

d. Shared Understanding (Pemahaman Bersama)

Shared Understanding dalam mengurangi praktik rentenir ini dilakukan dengan saling berbagi pengertian dan pemahaman antara pihak yang satu dengan

yang lainnya dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam forum secara bersama-sama agar setiap stakeholder memiliki pemahaman yang sama antara satu dengan yang lainnya, serta akan menyadari nilai-nilai dasar yang menjadi dasar dalam forum tersebut. Berbagi pengertian dan pemahaman sudah dilakukan oleh pihak pemerintah desa dan unsur lainnya, salah satu kegiatan yang akan dilakukan yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat akan dampak rentenir. Sehingga sedikit bisa mengurangi masyarakat untuk tidak lagi meminjam kepada rentenir/bank emok. Untuk proses ini dijumpai masalah seperti timbulnya kesalah pahaman antar masyarakat dengan pemerintah desa, karena selama ini pemerintahan desa tidak memberikan solusi lain selain meminjam ke rentenir, adapun bumdes di desa balokang sampai saat ini uang yang ada dimasyarakat kurang lebih 1,2 M.

e. Intermediate Outcomes (Hasil Sementara)

Intermediate Outcomes merupakan hasil sementara dari proses yang sedang berlangsung yang memberi manfaat dan bernilai strategis. Hasil sementara yang dapat dilihat manfaatnya yaitu dari kerjasama dengan PNM Mekar sudah sesuai dengan yang diharapkan walaupun belum berdampak besar bagi masyarakat Desa Balokang tetapi telah berkontribusi terhadap masyarakat, masyarakat merasa terbantu untuk meminjam ke PNM (Permodalan Nasional Madani).

PNM (Permodalan Nasional Madani) sendiri merupakan lembaga keuangan milik negara yang dibentuk sebagai komitmen pemerintah dalam mengembangkan, memajukan dan memelihara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). PNM hadir di Desa Balokang sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan dan program peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Syarat dalam peminjaman di PNM adalah Wanita yang berusia diatas 18- 36 tahun, KK dan KTP suami istri, modal

tersebut pertama sekitar 2 sampai 3 juta jika sudah lunas limit saldo mencapai 9 juta rupiah.

PNM mekaar juga menganut system kelompok, apabila peminjam untuk yang kedua kalinya lancar maka akan diberikan pinjaman berikutnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka kesimpulan dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk poin-poin berikut:

Pelaksanaan Collaborative Governance dalam mengurangi praktik rentenir “bank emok di Desa Balokang Kecamatan Banjar Kota Banjar dapat dikatakan belum berjalan secara optimal, hal ini terlihat dari beberapa proses *collaborative governance* menurut Ansell dan Gash yang tidak tercapai seperti (1) Belum dilakukannya kerjasama dengan pihak swasta; (2) Proses pelaksanaan kerjasama yang belum berjalan dengan sebagaimana mestinya, dan (3) timbulnya kesalah pahaman antar pihak/ stakeholder dalam hal menentukan sistem kebijakan yang akan diterapkan.

Dibutuhkan sebuah edukasi bagi masyarakat akan dampak rentenir di desa Balokang dan pemerintah desa harus mampu menindak tegas praktik di desa balokang, selain itu pemerintah desa harus mampu membuat program masyarakat anti riba.

DAFTAR PUSTAKA

- Islamy, Syaeful. 2018. Collaborative Governance: Konsep dan Aplikasi: Budi Utama
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta